

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH
PORTER**

(Studi Kasus di Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung**

Oleh:

Rendy Fernanda Setiawan

NPM : 1621030538

Jurusan : *Muamalah* (Hukum Ekonomi Syariah)



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH
PORTER**

(Studi Kasus di Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung**

Oleh:

Rendy Fernanda Setiawan

NPM : 1621030538

Jurusan : *Muamalah* (Hukum Ekonomi Syariah)



Pembimbing I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2020

ABSTRAK

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya.

Porter adalah orang yang bertugas melakoni peran dalam sebuah perjalanan mendaki, porter adalah orang-orang yang dibayar untuk membantu membawa barang-barang para pendaki pada saat melakukan aktivitas pendakian gunung. Seringkali porter juga bertugas untuk menyiapkan makanan pada saat pendakian. Singkatnya, tugas porter adalah melayani para pendaki yang telah membayar mereka.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, dan manusia memiliki kebutuhan untuk melakukan suatu kegiatan. Salah satunya adalah dengan melakukan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri atau bagi orang lain.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembayaran upah tanpa akad diawal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah praktik upah porter tanpa akad diawal di Gunung Seminung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan praktik upah porter dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap masalah praktik upah porter tanpa akad diawal di Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif. Studi pada penelitian praktik upah porter di Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat.

Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis kualitatif dengan menggunakan metode dengan cara berfikir deduktif.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menyebarluaskan kepada masyarakat umum tentang informasi-informasi positif yang ada di sekitar kawasan Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat khususnya tentang porter.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa praktik pembayaran upah porter yang terjadi di Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat yaitu ketidakjelasan (*Gharar*), dimana porter menawarkan jasanya tanpa ada kesepakatan harga yang ditetapkan oleh kedua belah pihak sebelumnya.

Setelah sampai setengah perjalanan atau setiba di puncak Gunung Seminung porter meminta bayaran kepada pendaki senilai Rp. 500.000.00,-, di pandang tidak adil karena salah satu pihak ada yang dirugikan. Seharusnya, penetapan harga disebutkan diawal perjanjian maka tidak akan ada salah satu pihak yang akan dirugikan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rendi Fernanda Setiawan


NPM : 1621030538

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Porter (Studi Kasus di Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat)**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 17 Januari 2020
Penulis,

Rendi Fernanda Setiawan
NPM. 1621030538



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Rendi Fernanda Setiawan
NPM : 1621030538
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Porter (Studi Kasus di Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat).

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Khoirul Abror, M. H.
NIP. 195704031987031003

Pembimbing II

Ghandi Liyorba Indra, M. Ag.
NIP. 197009011997031002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran
Upah Porter (Studi Kasus di Gunung Seminung, Desa Teba Pering Raya,
Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat).**

Disusun oleh : Rendi Fernanda Setiawan

NPM : 1621030538

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, SH., M.M.

Sekertaris : Dani Amran Hakim, SH., M.H.

Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Penguji II : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Khoiruddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa (4) 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas Hidayah-Nya karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Bambang Aslina dan Ibu Suyatmi, S.Pd.I yang senantiasa selalu mendo'akan dalam setiap waktunya selalu memberikan semangat, nasehat bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Keluarga yang ku sayangi: kakak-kakak ku Sondy Ferndiansyah, Wempi Marta Dinata, Bramantio Gustian yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi keberhasilan studiku.



RIWAYAT HIDUP

Rendi Fernanda Setiawan, dilahirkan di Bandar Lampung, 28 Februari 1998. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan bapak Bambang Aslina dan ibu Suyatmi S.Pd.I.

Pendidikan dimulai dari TK Al-Hikmah Tanjung Senang dan selesai pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri 02 Tanjung Senang dan selesai pada tahun 2010, SMP Gajah Mada Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2013, SMA Negeri 12 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Hesy) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017.

Selama menimba ilmu di kampus hijau UIN Raden Intan Lampung, peneliti aktif dalam organisasi kemahasiswaan seperti Unit Kegiatan Mahasiswa MAHARIPAL (UKM Mahasiswa Raden Intan Pecinta Alam) pada periode 2016/2017.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Porter (Studi Kasus di Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat)**. Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga (Konsentrasi Ilmu Hukum) di UIN Raden Intan Lampung.

Shalawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita yakni *Al Uswatun Hasanah* Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat dan ummatnya yang *Insyallah* selalu melanjutkan dakwah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program (S1) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (S.H). Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri., M.Ag. Beserta jajarannya.
2. Dekan Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi peneliti hingga skripsi ini selesai dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, M. Ag. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN dan Ibu Juhrotul Khulwah, M. Si selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan di kampus.
6. Orang yang selalu mendoakan disetiap waktunya untuk keberhasilan dan kesuksesan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa dan keluargaku Unit Kegiatan Mahasiswa MAHARIPAL UIN Raden Intan Lampung.
8. Sahabat yang senantiasa mendengarkan cerita saya serta memberi saran Wahyu Izhan Faturiadi, Rio Ramadhani, Rizka Anisa, Rima Ambarwati, Angki Aditya, Ocha Azhar yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Petugas perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
10. Para sahabat seperjuanganku Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2016.
11. Teman-teman KKN kelompok 99.
12. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidupku. *Jazakumullah*

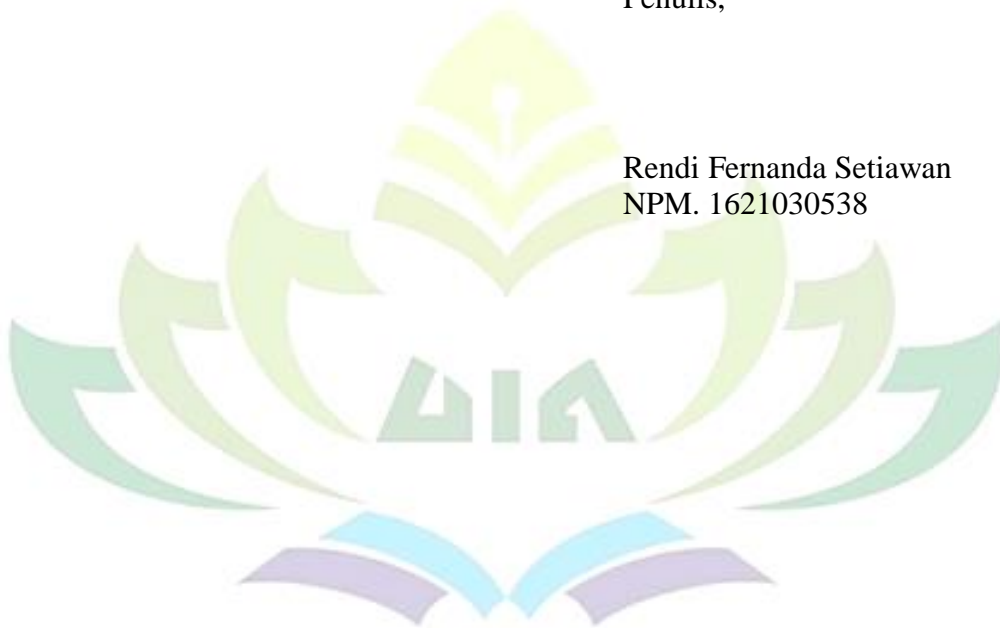
Semoga amal ibadah dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Saya sadar dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan sarannya yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil

penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.
Amin Ya Robbal ‘alamin.

13. Almamater kebanggaan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadikan ku manusia
yang bermanfaat serta berkah dan diridhoi Allah SWT. Amin

Bandar Lampung, Januari 2020
Penulis,

Rendi Fernanda Setiawan
NPM. 1621030538



DAFTAR ISI

JUDUL	
SURAT PERNYATAAN	
PERSETUJUAN BIMBINGAN	
PENGESAHAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Siginifikasi Penelitian	10
H. Metode Penelitian.....	10
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Ijarah	16
1. Pengertian Ijarah	16
2. Dasar Hukum Ijarah	17
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	20
4. Macam-Macam Ijarah.....	25
5. Pendapat Ulama Tentang Ijarah	30
6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	32
B. Porter	35
1. Pengertian Porter.....	35
2. Dasar Hukum Porter	41
3. Rukun dan Syarat Porter	46
4. Macam-Macam Porter	51
5. Sistem Pengupahan (Porter) dan Berakhirnya Akad	52
C. Tinjauan Pustaka.....	57
 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
1. Sejarah Gunung Seminung	59
2. Letak Greografis Gunung Seminung.....	61
3. Keadaan Sosial Budaya di Sekitar Kawasan Gunung Seminung	63
4. Keadaan Sosial Keagamaan di Sekitar Kawasan Gunung Seminung ...	64
B. Praktik Pembayaran Upah Porter Di Gunung Seminung	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Praktik Pelaksanaan Pembayaran Upah Pengangkut Barang (Porter)71
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Porter73

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....77
- B. Rekomendasi78

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Dengan Narasumber
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Bukti Turnitin



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Perincian Penduduk Menurut Agama
2. Tabel 2. Tempat Peribadahan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna untuk mempermudah mendapatkan informasi serta yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa yang terkait dengan tujuan penelitian ini, dan dengan adanya penjelasan dari judul ini diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman istilah-istilah yang digunakan pada judul ini. Judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Porter (studi di Gunung Seminung, Lampung Barat), adapun istilah yang akan dibahas sebagai berikut.

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala.

¹ Department pendidikan Nasional, *Kamus Besarbahasa indonesia pusat bahasa*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama Cetke IX Edisi IV, 2015), h.58

Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.²

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, sedangkan menurut Benham ialah upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang member pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.³

Porter adalah orang yang bertugas melakoni peran dalam sebuah Perjalanan mendaki.⁴ Porter adalah orang-orang yang dibayar untuk membantu membawa barang-barang para pendaki pada saat melakukan aktivitas pendakian gunung. Seringkali porter juga bertugas untuk menyiapkan makanan pada saat pendakian. Singkatnya, tugas porter adalah melayani para pendaki yang telah membayar mereka.

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud judul proposal ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Porter atau orang yang membantu membawakan barang bawaan kita (studi di Gunung Seminung, Lampung Barat). Maksud dari judul penelitian tersebut diatas adalah untuk memberikan kejelasan terhadap praktik upah porter tersebut.

² H. Ahmad Sanusi, dan Sohari, *Ushul Fiqh.*, 2015., PT. Raja Grafindo: Jakarta.

³ Department Pendidikan Nasional, h. 529

⁴ Undang-Undang 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pengupahan, Pasal 1.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah:

1. Alasan objektif, alasan objektifnya adalah dengan melihat munculnya masalah terhadap porter yang tiba-tiba membawakan barang bawaan tanpa akad terlebih dahulu dari sudut padangan Hukum Islam.
2. Alasan subjektif, ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pengupahan merupakan masalah Hukum merupakan aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia biasa, secara terminologi umum, hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Sedangkan dalam istilah Islam hukum merupakan titah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang sudah mukallaf dalam hal tuntutan melakukan sesuatu atau meninggalkannya (seperti wajib, sunnah, haram dan makruh) atau kebebasan.⁵ perbuatan (mubah) atau dalam pernyataan sah dan tidaknya suatu perbuatan sehingga tercapai keadilan. Disamping itu hukum juga bertujuan melindungi pihak yang lemah dari yang kuat seperti dizaman saat ini.

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), h. 15.

usaha yang dianjurkan adalah yang sesuai dengan aturan agama Islam. Oleh karena itu apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan agama Islam bagaimana dengan upah yang diterima karena telah mengerjakan pekerjaan yang telah dilarang dalam islam. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan Imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan di rugikan guna mendapatkan tambahan serta berinteraksi sosial, seperti yang terjadi di Gunung Seminung, Lampung Barat sebagai salah satu Mendapatkan penghasilan tambahan selain berkebun.

Porter adalah orang yang bertugas melakoni peran dalam sebuah perjalanan mendaki.⁶ Porter adalah orang-orang yang dibayar untuk membantu membawa barang-barang para pendaki pada saat melakukan aktivitas pendakian gunung. Seringkali porter juga bertugas untuk menyiapkan makanan pada saat pendakian. Singkatnya, tugas porter adalah melayani para pendaki yang telah membayar mereka.

Para pihak yang menyenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan diri sendiri dengan kerelaan. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad oleh satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain. Didalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik mu'ajir ataupun musta'jir.

Dalam kerangka ini, kedua belah pihak yang melakukan akad dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan objek yang mereka jadikan sasaran sehingga keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan

⁶ Undang-Undang 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pengupahan, Pasal1.

dikemudian hari. Suatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.

Dengan sifat yang seperti ini maka objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan. Seperti halnya adanya kuli pengangkut barang (porter) di Gunung Seminung, Lampung Barat. Pengguna jasa kuli (porter) membayar yang telah disepakati bersama. Transaksi penentuan harga sebelum kuli pengangkut barang (porter) menawarkan tanpa menjelaskan tarif jasa porter, kemudian setelah dipuncak porter meminta upahnya kepada pengguna jasa porter. Akan tetapi perlu diingat, bahwa hukum Islam praktek upah ini memiliki syarat dan ketentuan yang salah satunya yaitu melakukan perjanjian atau akad.

Selain itu juga karena manusia melakukan kegiatan memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum yang dimaksud, baik yang bersifat dari kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadits. Selain itu, hubungan individu dengan yang lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari juga diatur dalam fiqh muamalah.

Allah dengan menurunkan wahyu-Nya sebagai petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an menjelaskan sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Sesuai firman Allah SWT (Q.S Al-Maidah (6)):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقُلُودَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: ‘‘Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya’’. (Q.S Al-Maidah (6))

Tolong-menolong didalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak akan lepas dengan berbagai macam transaksi (akad). Salah satu bentuk akad yang dimaksud tersebut dalam hukum Islam adalah ijarah. Tujuan utama ijarah yaitu saling membantu dan saling mencukupi terhadap apa yang mereka butuhkan, dimana dalam ijarah pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat atau pembayaran atas pemberian manfaat suatu barang, bukan barangnya tetapi manfaatnya.

Ijarah yang berarti juga perjanjian kerja, ada kalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang atau lembaga tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus bagi seseorang atau beberapa orang *musta'jir*.⁷

Banyak hadis Nabi yang memberikan keterangan bahwa Nabi dan para sahabatnya melakukan perjanjian upah mengupah, yang berarti upah mengupah merupakan perjanjian atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum Islam selama itu perjanjian yang bukan terlarang. Ijarah tentunya tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia terutama masyarakat yang berada di kota-kota besar yang telah maju. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

⁷ Rachmad Syafe’I., *Fiqh Muamalah* (Jawa Tengah: Pustaka Setia) hal; 109.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa 29)⁸

1. Geografis Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat

Gunung Seminung berlokasi disebelah barat laut Kota Liwa, Lampung Barat. Gunung Seminung ini terletak diperbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan, oleh karena itu, beberapa wilayahnya menjadi Kecamatan lain berada di Ranau, Provinsi Sumatera Selatan. Gunung Seminung memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan dengan Gunung lain yang ada di Lampung. Seiring dengan adanya antusias pendaki untuk mendaki Gunung Seminung maka penduduk desa setempat menawarkan kemudahan bagi para pendaki baik perorangan maupun instansi yang membutuhkan jasa kuli pengangkut barang (porter).⁹

Fungsi porter bukan hanya pengangkut barang bawaan pendaki. Lebih dari itu, porter juga akan menjadi *story teller* sepanjang perjalanan kita. Mendaki gunung adalah aktivitas yang susah-susah gampang, ada susahnyanya tetapi cukup mengasyikkan. Belum lagi jika pemandangan selama mendaki dan kenangan dbersama teman-teman. Tetapi terkadang bawaan yang sangat banyak membuat kita harus menyewa porter untuk meringankan beban saat perjalanan mendaki, tetapi bukan hanya itu saja, dibawah ini beberapa fungsi porter saat mendaki gunung adalah sebagai berikut:

⁸ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 126.

⁹ Wawancara Dengan Kepala Desa Teba Pering Raya, 29 Agustus 2020.

- a. Membantu meringankan beban bawaan.
- b. Keamanan selama mendaki
- c. Mereka juga dapat menjadi guide selama pendakian

2. Fakta-fakta Seorang Porter Gunung

Porter sangat penting keberadaannya terutama bagi para pendaki pemula. Membawa beban yang berat dengan kondisi medan yang ekstrim adalah tantangan yang sangat besar. Maka dari itu keberadaan porter sangat diharapkan karena mereka adalah tempat para pendaki bergantung hidup.

Menjadi seorang porter tidaklah sembarangan, meskipun tidak benar-benar ada syarat khusus. Berikut adalah fakta-fakta porter:

- a. Porter adalah penduduk desa setempat yang benar-benar menguasai dan paham dengan medan.
- b. Porter mudah bekerjasama
- c. Porter memiliki informasi tentang destinasi lokasi sekitar
- d. Porter biasanya orang yang menyenangkan dan humoris
- e. Porter bukanlah pekerjaan utama
- f. Idealnya satu porter untuk tiga orang pendaki.¹⁰

D. Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian bersifat lapangan yaitu pada kuli pengangkut barang (porter) yang berada sekitar Gunung Seminung, Lampung Barat.
2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah penerapan praktik upah pada kuli pengangkut barang (porter) terhadap tinjauan hukum Islam mengenai

¹⁰ Wawancara Dengan Kepala Desa Teba Pering Raya, 29 Agustus 2020.

upah kuli pengangkut barang (porter) di Gunung Seminung, Lampung Barat.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diambil, yakni:

1. Bagaimana praktik upah kuli pengangkut barang (porter) di Gunung Seminung, Lampung Barat.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah kuli pengangkut barang (porter) di Gunung Seminung, Lampung Barat.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam kasus penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik upah kuli pengangkut barang (porter) di Gunung Seminung, Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah sebagai kuli pengangkut barang (porter) di Gunung Seminung, Lampung Barat.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan praktik upah porter yang terjadi dimasyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya

sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian itu yakni dengan data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode bersifat lapangan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan berupa penelitian lapangan (*field reseach*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menentukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat.

Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik upah kuli pengangkut barang (porter) di Gunung Seminung, Lampung Barat. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif berdasarkan teori tentang upah yang bersifat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena praktik. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik dari kegiatan upah tersebut.¹¹

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian di Gunung Seminung, Lampung Barat. Yaitu langsung dari kuli pengangkut barang (porter) tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: sumber primer Fikih, Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Kompilasi Hukum Syari'ah. Data sekunder yang diperoleh penelitian dari

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet ke-9 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)

buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah objek yang akan menjadi target untuk sasaran keberlakuan suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 35 orang.

b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan yang diteliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah jasa dan kuli pengangkut barang (porter) sesuai dengan kebutuhan si pengguna jasa tersebut. 35 orang terdiri dari:

- Porter 10 orang.
- Penjaga Basecamp Pendakian Gunung Seminung 5 orang.
- Pendaki 20 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. *Observasi*

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi

langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik upah kuli pengangkut barang (porter) di Gunung Seminung, Lampung Barat

b. *Interview atau Wawancara*

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada kuli pengangkut barang (porter) di Gunung Seminung, Lampung Barat.

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan *variable* yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara, diantaranya:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa data yang dikumpulkan yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang upah sebagai kuli pengangkut barang (porter) di Gunung Seminung, Lampung Barat.

- b. *Organizing*, yaitu tahapan analisis dan perumusan aturan tentang upah kuli pengangkut barang (porter) di Gunung Seminung, Lampung Barat.
- c. *Analizing*, yaitu tahadap dan perumusan aturan tentang upah kuli pengangkut barang (porter) di Gunung Seminung, Lampung Barat.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul dengan cara mengklarifikasikan semua jawaban untuk analisa. Data yang diperoleh dilapangan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan.

Dalam menarik kesimpulan akhirnya peneli menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalis-generalis yang mempunyai sifat umum.

BAB II

KAJIAN TEORI

A) *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ”*al-Ijarah*”, berasal dari kata *al-Ajru* menurut bahasa artinya ialah *al-Iwadh*. Dalam bahasa Indonesia diartikan ganti dan upah”.¹² Menurut fatwa DSN-MUI, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹³

Terjadi perbedaan pendapat, mengenai pengertian *ijarah* di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas manfaat disertai imbalan berupa harta. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah untuk masa tertentu disertai imbalan.¹⁴

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah*

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h.114.

¹³Fatwa DSN-MUI No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Bandung: Al Ma’arif, 1987), h.29.

kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.¹⁵

Taqyuddin an-Nabhani juga menyebutkan dalam bukunya, bahwa sewa menyewa atau *ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajiir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajiir*.¹⁶

Sementara itu menurut Muhammad Syafi'i Antonio, sewa menyewa atau *ijarah* adalah pemindahan hak bangunan atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁷

Serta menurut al-Islam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab *Fath AlWahab*, sewa menyewa atau *ijarah* ialah *Ijarah* (sewa menyewa) secara bahasa yaitu nama untuk pengupahan sedang sewa menyewa secara syara' adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengambilan (imbalan) dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* (sewa menyewa), adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada

¹⁵M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah* (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), h. 180.

¹⁶Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternative Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 83.

¹⁷Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.117.

¹⁸Abi Yahya Zakaria, *Fath Al Wahab*, Juz I (Semarang: Toha Putra, 2007), h. 246.

orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima, serta orang yang menerima barang atau manfaat tersebut harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat yang telah diatur oleh *syara*'.¹⁹

2. Pendapat Ulama Tentang Ijarah

Hukum *ijarah* telah disepakati oleh para ulama seluruhnya dengan landasan “Mempersewakan barang, dibenarkan *syara*”, terkecuali Ibnu Ulayyah. Beliau tidak membolehkan *ijarah* dengan alasan: “Akad *ijarah* (sewa menyewa harus dikerjakan oleh kedua belah pihak). Tak boleh salah seorangnya sesudah akad yang shahih itu membatalkan, walaupun karena uzur melainkan kalau terdapat sesuatu yang memfasakan akad, seperti cacat pada benda yang disewa itu”.

Demikian juga pendapat Imam Malik dan Ahmad yang tidak membolehkan *ijarah* dengan alasan bahwa sewa-menyewa tersebut tidak bisa batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan akad-akad yang tetap, seperti akadnya cacat atau hilangnya tempat mengambil manfaat itu. Para ulama yang lain yang tidak menyepakati *ijarah* adalah Abu Bakar al Asham, Ismail Ibn Aliyah, Hasan Al Bashri, Al Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan yang beralasan bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak

¹⁹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 134.

dapat dikategorikan jual beli.²⁰

Abu Hanifah beserta ashabnya berpendapat bahwa “ Boleh dibatalkan penyewaan karena sesuatu peristiwa yang terjadi walaupun dari pihak yang menyewa, umpamanya ia menyewa suatu kedai untuk berniaga kemudian kedai itu terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau jatuh bangkrut, maka bolehlah ia membatalkan penyewaan.²¹

Ijarah menjadi fasakh (batal) dengan hal, sebagai berikut: Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi „aib.

Rusaknya barang yang diupahkan (*Ma'jur'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang), Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata, boleh memfasakh *ijarah*, kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti

²⁰ Rahman Safei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h.123

²¹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 428.

seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, dicuri, dirampas, bangkrut maka ia berhak memfasakh *ijarah*.³⁰ jika masa atau waktu yang telah habis sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya, maka jika telah habis tempo, akad sewa menyewa itu menjadi berakhir, kecuali jika terdapat udzur yang mencegah fasakh itu.

Seperti contoh *ijarah* pertanian jika panen sudah tiba, namun telah berakhir maka tetap berada di tangan penyewa sampai masa panen selesai, sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerusakan) pada pihak penyewa yaitu orang mencabut tanaman sebelum waktunya.

Penganut mazhab Hambali berkata:

“manakala *ijarah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya dan tidak ada kepastian mengembalikan untuk menyerah-terimaknya, seperti barang titipan, karena ini merupakan akad yang tidak menuntut jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan atau menyerah-terimaknya. Mereka berkata: “setelah berakhirnya masa maka ia adalah amanat yang apabila terjadi kerusakan tanpa diniat atau sengaja, tidak kewajiban untuk menanggungnya”.

3. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah*, dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an, Hadits serta ijma' para ulama. Dasar hukum *ijarah*, yaitu sebagai berikut:

a) Al – Qur'an

1) QS.Al-Baqarah (2): 233, yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya: "... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".²²

Ayat diatas, memiliki makna bahwa tidak ada halangan sama sekali jika akan memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan dari ibunya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan dalam hal ini perempuan yang menyusukan anak kepada pihak penyewa.

Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya, tetapi orang yang dipekerjakannya. Menurut Qatadah dan Zuhry, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan jalan melalui musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain, maka dapat diberikan upah yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, dan hendaklah ditunaikan.²³

2) QS.Al-Zukhruf (43) ayat 32, yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015), h. 37.

²³Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam, Cet ke-1* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 136.

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.²⁴

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa, agar manusia saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan yang lain atau juga disebut tolong menolong. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengandemikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan *ijarah* atau upah-mengupah.

3) QS At-Thalaaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْعِ لُهُ أُخْرَىٰ ۖ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka

²⁴ Abdul Halim Binjai., h. 491.

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²⁵

Ayat ini menerangkan bahwa menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan jasa dari orang yang telah dipekerjakannya. Tradisi bangsa arab pada zaman dahulu adalah menyusukan anaknya kepada orang lain, dari sini munculah istilah saudara satu susuan atau ibu susu, sebagaimana Rasulullah SAW disusukan kepada Halimah Al-Sa’diyah.²⁶

b) Hadits

1) Rasulullah SAW menjelaskan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ
(رواه البخاري)

Artinya: “Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda kepada Abu Hurairah, adapun dia dikala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta.”(H.R Bukhari)²⁷

Hadits adalah sebuah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam.²⁸ Semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat, ini termasuk pengertian hadits secara terbatas.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h. 1202.

²⁶ Syamsul Hilal, *Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat, Asas*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 3.

²⁷ Achmad Sunarto at-al, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7 (Semarang: As-syifa, 1983), h. 520.

²⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani yang diterjemahkan oleh Ahmad Yoswaji, *Shahih Sunan An-Nasa'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 58.

Sementara untuk pengertian yang luas menurut para *muhadditsin*, tidak hanya mencakup sesuatu yang dikaitkan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi juga perkataan, perbuatan dan ketetapan yang disandarkan kepada para sahabat dan *tabi'iy* pun disebut *al-hadits*, dengan demikian hadits dapat diartikan meliputi segala yang disandarkan kepada para sahabat, disandarkan kepada *tabi'iy* dan yang pastinya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.²⁹

c) *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah ber-*ijma'*, bahwa *ijarah* diperbolehkan karena terdapat manfaat bagi manusia. Semua ulama bersepakat, mengenai pen-*syariatanijarah* ini, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada yang membantah pun hanya beberapa orang, dan hal itu tidak dianggap.

Dari beberapa *nash* yang ada, dapat dipahami bahwa pen-*syariatanijarah* dalam Islam, dikarenakan pada dasarnya antara manusia satu dengan yang lainnya saling terikat dan juga membutuhkan. *Ijarah* (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* termasuk salah satu bentuk aktivitas antar dua pihak, yang saling meringankan, serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan oleh Islam. *Ijarah* merupakan salah satu

²⁹Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musaththalahul hadits* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 20.

jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh karena itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan suatu hal yang diperbolehkan.³⁰

4. Rukun dan Syarat

a) Rukun *Ijarah*

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap perikatan.³¹ Rukun *ijarah*, yaitu sebagai berikut:

1) *Aqid*

Aqid, yaitu pihak yang melakukan akad. Dalam *ijarah*, pihak yang melakukan akad yaitu, pihak yang menyewa atau pengguna jasa atau disebut *musta'jir*, dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa atau disebut *mu'jir*. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (*baligh*).³²

2) *Sighat*

Sighat, adalah ijab kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa menyewa akan menjadi sah, jika ada ijab dan kabul, dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya, yang dapat menunjukkan adanya persetujuan antara para pihak.

³⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 121-124.

³¹Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25.

³²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 145.

3) *Upah*

Upah, yaitu uang sewa yang harus dibayarkan pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan. *Upah* harus ditentukan di awal serta disepakati kedua pihak. Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *upah*. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *upah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. “Tetapi pada waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhirkan imbalan.”³³

4) Manfaat

Maksudnya yaitu, suatu barang yang disewa atau jasa, serta tenaga dari orang yang bekerja mengandung nilai manfaat bagi pihak yang menyewa.³⁴ Manfaat sewa menyewa bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu: dapat memenuhi hajat orang banyak, menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain, serta menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan penyewa dan yang menyewakan.³⁵

b) Syarat *Ijarah*

Adapun syarat *ijarah*, yaitu sebagai berikut:

³³ Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 30.

³⁴ Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*..., h. 27.

³⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ..., h. 139.

1) Syarat Para Pihak

Dalam hal ini para pihak yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*, disyaratkan *baligh*, berakal, dan atas kehendak sendiri.³⁶ Dalam hal ini *mu'jir* selaku penyewa barang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: penyewa dapat memanfaatkan barang yang disewa, penyewa mendapatkan jaminan atas barang yang disewa, serta mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang yang disewa.

Selain itu kewajiban penyewa barang, yaitu sebagai berikut: menjaga keutuhan barang yang disewa atau tidak merusak barang yang disewa, memberikan bayaran atau uang sewaan terhadap barang yang disewa kepada pihak yang menyewakan, serta mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan kedua belah pihak.

Pada dasarnya penyewa boleh menyewakan kembali barang atau benda yang disewakannya kepada orang lain. Pihak penyewa boleh menyewakan kembali dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang disewa pertama, sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan.

Disyaratkan pula para pihak yang melakukan perjanjian saling meridhai.³⁷ Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa (4) ayat 29, yang berbunyi:

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 117.

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 117.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁸

Ayat diatas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan.³⁹

2) Syarat Objek *Ijarah*

Dalam h.al ini syaratnya yaitu, objek *ijarah* yang berupa barang atau jasa yang akan disewakan tersebut, harus diketahui oleh kedua belah pihak, kepemilikan barang tetap pada yang menyewakan, dan barang yang disewakan memberikan manfaat pada penyewa. Syarat lainnya yaitu, barang yang disewakan dapat diserahkan oleh pemilik kepada penyewa, serta barang yang disewakan bukan termasuk barang-barang yang dilarang oleh agama.

Syarat lainnya yaitu diketahui jelas ukuran dan batas waktu *ijarah* oleh kedua belah pihak agar terhindar dari perselisihan, benda dan manfaat dari ‘objek yang disewakan harus sesuatu yang

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h. 83.

³⁹Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia” Jurnal Al-Adalah. Vol. II No. 2, h. 227. (OnLine), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> diakses (Online) Tanggal 8 Januari 2020).

diperbolehkan agama (*mutaqawimmah*), dan perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang *fardhu* atau diwajibkan kepada *mu'jir* (penyewa), seperti shalat, puasa, haji, imamah sholat, azan dan iqamah.⁴⁰

3) Syarat *Ujrah*

Ujrah, adalah imbalan sebagai bayaran (uang sewa). Dalam hal ini syaratnya, yaitu diketahui jumlah uang sewanya, tidak berkurang nilainya, dapat memberikan manfaat.

4) Syarat *Shighat (ijab kabul)* atau akad

Dalam hal ini syaratnya, yaitu akad harus dilakukan sebelum barang yang disewa tersebut digunakan manfaatnya, akad tersebut tidak disangkut pautkan dengan urusan lain antara pemilik dan penyewa, serta dalam akad tersebut, harus ditentukan waktu sewanya, serta perjanjian lainnya yang menyangkut perjanjian tersebut, pada dasarnya akad harus dilakukan secara jelas antara kedua belah pihak.⁴¹

5) Macam-Macam *Ijarah*

Ijarah, ada dua macam yaitu:

a) *Ijarah 'Ala Al-Manfi'*

- 1) *Ijarah 'Ala Al-Manfi'*, yaitu *ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam hal ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Seperti contoh, menyewakan mobil atau kendaraan, menyewakan rumah dan lain-lain, Yang perlu di perintahkan

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 118.

⁴¹Hendi Suhendi., *Fiqh Muamalah*, h. 188.

adalah tidak boleh menjadikan objek sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh *syara'*. Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari bangkai dan darah, karena hal tersebut diharamkan.

b) *Ijarah 'Ala Al-'Amal Ijarah*

Ijarah 'Ala Al-'Amal Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam *ijarah* ini, objek akadnya amal atau pekerjaan seseorang. Contohnya adalah penjahit atau jasa insinyur dalam pembangunan dan lain-lain. Dan tentunya manfaat yang diberikan tidak keluar atau dilarang oleh *syara'*. Akad *ijarah* ini, terkait erat dengan masalah upah mengupah. *Ajir* dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

- 1) *Ajir Khass* (pekerjaan khusus) : pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditentukan. Contoh : pembantu rumah tangga, menyusui anak (seperti zaman Rasulullah).
- 2) *Ajir Musytarak*: orang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terkait oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan penyerahan dirinya terhadap pihak lain. Contoh insinyur atau pengacara.⁴²

Selain pembagian *ijarah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijarah* lain yang sedikit berbeda,

⁴²Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Amzah, 2015), h. 329-334.

pembagian *ijarah* ini terdapat dalam Madzhab Syafi'i, adapun pembagian *ijarah* menurut Mazhab Syafi'i sebagai berikut :

- a) *Ijarah 'Ain*, adalah *ijarah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *ijarah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama: barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua: barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. *Ijarah* ini oleh Madzhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang. Contohnya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. "Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka jumhur ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.
- b) *Ijarah immah*, adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diadakan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam Mazhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (*salam*). Yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan.⁴³

⁴³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,... h. 22.

6) Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Pada dasarnya *ijarah* merupakan perjanjian yang lazim, kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak dibolehkan saling merusaknya, dikarenakan jenis perjanjian tersebut termasuk perjanjian timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena *ijarah* termasuk dalam akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga, memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli.⁴⁴

Bahkan apabila salah satu pihaknya baik yang menyewakan atau yang menyewa meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa ini tidak akan menjadi batal selama yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih tetap ada. Karena apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh ahli warisnya.

Begitu juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa oleh pihak yang menyewakan tidak menyebabkan putusya perjanjian yang telah diadakan sebelumnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila terdapat dasar atau alasan-alasan yang kuat untuk itu.⁴⁵

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batal atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa yaitu:

⁴⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Amzah, 2010), h. 338.

⁴⁵Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* .h. 137-138.

a) Meninggalnya Pihak Yang Melakukan Akad

Menurut pendapat Hanafiah, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad dapat menyebabkan berakhirnya akad. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan, *ijarah* termasuk akad yang lazim, seperti jual beli, yakni *musta'jir* atau penyewa memiliki manfaat atas barang yang disewa, dengan sekaligus menjadi hak milik yang tetap, sehingga dapat berpindah ke ahli waris. Jadi kematian bukan tidak dapat menjadi penyebab berakhirnya *ijarah* dan mengakibatkan *fasakh*.

b) *Iqalah*

Iqalah, yaitu pembatalan oleh kedua pihak. Hal ini dikarenakan *ijarah* adalah akad *mu'awadah* (tukar menukar) harta dengan harta, sehingga memungkinkan adanya pembatalan.

c) Rusaknya Barang Yang Disewa

Rusaknya barang yang disewa dapat menyebabkan batalnya akad *ijarah*. Karena jika barang yang disewakan rusak, maka salah satu pihak dapat melakukan pembatalan sewa menyewa tersebut. Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak, sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya, yang menjadi objek sewa menyewa adalah rumah, dan ternyata rumah itu terbakar habis, maka dalam hal ini pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan perjanjian kepada pihak penyewa.

d) Masa Sewa Telah Selesai

Jika masa sewa yang disepakati telah usai, maka berakhirlah akad sewa menyewa. Kecuali ada *udzur* (halangan), seperti contoh sewa tanah untuk ditanami namun ketika masa sewa sudah habis sedangkan tanaman belum dapat dipanen. Dalam hal ini *ijarah*, dianggap belum selesai. Hal tersebut dapat dianggap usai, saat tanaman yang ditanam sudah dipanen.⁴⁶ Namun apabila dalam akad sewa menyewa salah satu pihak baik penyewa maupun pemilik mengalami musibah yaitu kematian, maka akad sewa menyewa sebelum masa sewa habis akan tetap berlangsung dan diteruskan oleh ahli warisnya.⁴⁷

e) Adanya *Uzur*

Maksudnya *uzur* disini adalah suatu halangan, sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dirampok orang atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan, maka dalam hal ini, pihak penyewa dapat memintakan pembatalan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak yang menyewakan.⁴⁸

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 338.

⁴⁷ D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet ke-4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 663.

⁴⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 139.

B) Porter

1) Pengertian Porter

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia, Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki kewajiban untuk bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta dan kekayaan, serta mencari karunia Allah SWT. Dengan demikian dalam teori ekonomi membedakan istilah upah dan gaji dilihat dari sisi jenis pekerjaan dan teknis pembayarannya. Dalam upah lebih kepada pekerjaan kasar yang mengandalkan fisik dengan pembayaran berdasarkan unit kerja yang diselesaikannya. Sedangkan gaji lebih kepada pekerjaan yang menggunakan keahlian tertentu yang pembayarannya ditetapkan berdasarkan waktu tertentu.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bias hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, dan manusia memiliki kebutuhan untuk melakukan suatu kegiatan. Salah satunya adalah dengan melakukan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Orang lain dapat melakukan sesuatu dengan melibatkan atau memfungsikan orang lain dengan ketentuan dan kegiatan, dengan konsekuensi harus memberikan imbalan yang akan menimbulkan bentuk kegiatan manusia yaitu adanya transaksi dalam suatu pekerjaan yaitu upah mengupah atas jerih payah orang lain tersebut jika tidak, berarti termasuk orang-orang yang zalim.

Setiap manusia akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.⁴⁹

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ujroh*. Secara etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al- 'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.⁵⁰ Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.⁵¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁵² Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁵³

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini,

⁴⁹*Ibid.*, h.77.

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*...., h. 60.

⁵¹Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 387.

⁵²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Cet-IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011).

⁵³Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 141.

Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.

Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, *“Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.”*

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya.⁵⁴

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan, Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan konvensional yang hanya memandang manusia sebagai barang modal. Manusia tidak boleh diperlakukan seperti halnya barang modal, misalnya mesin.

Sadeeq menyebutkan beberapa ketentuan yang akan menjamin diperlakukannya tenaga kerja secara manusiawi. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah: (1) Hubungan antara majikan (*musta'jir*) dan buruh (*ajir*) adalah *man to man brotherly relationship*, yaitu hubungan persaudaraan. (2) Beban kerja dan lingkungan melingkupinya harus memperhatikan

⁵⁴Muhammad, “Penjaminan tenaga kerja secara manusiawi” (On-line), tersedia di: <https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html> (12 November 2019).

nilai-nilai kemanusiaan. Seperti yang telah diutarakan, manusia tidak sama dengan barang modal. Manusia membutuhkan waktu untuk istirahat, sosialisasi, dan yang terpenting adalah waktu untuk ibadah. (3) Tingkat upah minimum harus mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dasar dari para tenaga kerja.⁵⁵

Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah yang islami dapat berasal dari dua sumber. Yakni (1) *Musta'jir*, dan (2) Pemerintah. *Musta'jir* yang beriman akan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah bagi *ajirnya*. Termasuk dalam nilai kemanusiaan adalah unsur adil.

Maksud adil dapat kita lihat dari pandangan Yusuf Qardhawi dalam bukunya, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Ia menjelaskan, “Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar-mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya), karena setiap hak diiringi kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.”

⁵⁵*Ibid.*

Jadi, maksud adil adalah harus ada kejelasan atau *aqad* (perjanjian) antara *musta'jir* dan *ajir*. Seorang *musta'jir* harus adil dan tegas dalam proses penentuan upah. Hak (upah) seorang *ajir* akan diberikan jika ia telah mengerjakan kewajibannya (pekerjaannya) terlebih dahulu. Dalam implementasi nilai-nilai keadilan, yakni (1) Adanya kewajiban untuk mengawasi, menjaga, dan mengoreksi implementasi nilai-nilai keIslaman kehidupan rakyatnya, termasuk didalamnya kebijakan mengenai upah; (2) Adanya kewajiban pemerintah untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, dalam hal ini baik *musta'jir* maupun *ajir*.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja yang tentunya juga tidak melanggar ketentuan sesuai dengan *syari'ah*, Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan *syari'ah* adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita.

Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad

dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain.

Dapat dibenarkan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).⁵⁶

Sementara Berdasarkan Pasal Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Upah harus memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, pemenuhan atas upah yang layak bagi penghidupan dan kemanusiaan, merupakan konsep pengupahan yang berlaku di Indonesia secara konstitusional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memaknai upah sebagai hak dasar pekerja yang harus dipenuhi pengusaha. Apabila pengusaha tidak membayar upah pekerja, maka hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan merupakan kejahatan yang dapat dipidana.⁵⁷

2) Dasar Hukum Upah

Terkait upah kerja, *syari'at* Islam tidak memberikan ketentuan secara rinci, ketentuan Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penetapan upah kerja, yaitu:

⁵⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 50.

⁵⁷Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

a) Al-Qur'an

1) QS. An-Nahl (16) ayat 90, yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ﴾⁵⁸

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁵⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi kerja, untuk berlaku adil, berbuat, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat”, dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, karena para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha mereka berhasil. Selain dari itu, maksud dari ayat tersebut yaitu, larangan bagi para pemberi kerja untuk berbuat keji dan melakukan penindasan seperti menganiaya.⁵⁹

Ayat tersebut menjelaskan bayaran atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 277.

⁵⁹Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika , 2004), h. 155.

dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia maupun diakhirat.⁶⁰

2) Q.S Al-Qashash (28) ayat 26-27 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۖ ٢٦ قَالَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجُ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”.⁶¹

Ayat di atas menerangkan bahwa *ijarah* telah disyariatkan untuk umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

Selain dalam Al-Qur'an, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah, yaitu:

⁶⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah(Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Quran)*, Cet ke 2(Jakarta: Lentera Hati, 2009), h.601.

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.... h. 1040.

b) Hadist

1) Hadist Rasulullah SAW menegaskan:

(رواه ابن ماجه) قُهِعَ رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ يُعْطَى الْأَجْرَ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.
(HR. Ibnu Madjah)⁶²

Hadits tersebut menjelaskan bahwa, sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan atau dengan kata lain sebelum keringatnya kering. Sebenarnya mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaannya selesai atau juga boleh setelah pekerjaannya selesai. Disyaratkan pula agar upah harus disebutkan secara jelas dan diberitahukan besar kecilnya.⁶³ Oleh karena itu kejelasan saat awal terjadinya akad dalam kegiatan *ijarahi* haruslah jelas isinya agar tidak ada pihak yang dapat merasa dirugikan oleh ketidakjelasan akad *ijarah*.

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak

⁶²Mu'Ammal Hamidy, Imron A. Manan, *Syarah Riyadhush Shalihin* (Surabaya: Bhina Ilmu, 2003), h. 362.

⁶³*Ibid*, h. 143.

dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma'* para ulama ini”, karena *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶⁴

Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'* maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentuk pada keterbatasan dan kekurangan.⁶⁵

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat *ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk

⁶⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. h. 18.

⁶⁵*Ibid*, h. 18.

harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.⁶⁶

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”. *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶⁷

3) Rukun dan Syarat Upah

a) *Aqid*

Aqid, yaitu pihak yang melakukan akad, dalam *ijarah*, pihak yang melakukan akad, disyaratkan *baligh*, berakal, dan atas kehendak sendiri. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'ajir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁶⁸ Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan *baligh*, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mummayiz* hukumnya sah. Menurut malikiyah, *mummayiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sementara *baligh* adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum *ijarah* (*syuruth al-nafadz*). Sementara

⁶⁶*Ibid*, h. 19.

⁶⁷Ibnu Rasyid, *Bidayah Al Mujtahid* juz 2, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, 2001), h. 165

⁶⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. h. 117.

kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah *baligh* dan berakal.⁶⁹

b) *Shighat* (akad)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-‘aqd*), terdiri atas ijab dan *qabul*. Syarat ijab *qabul* antara para pihak, sama dengan ijab *qabul* yang dilakukan dalam jual beli, hanya saja ijab dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c) *Ujrah* (upah).

Dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja (*ajir*) tersebut. Bukan didasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga barang yang dihasilkan. Upah yang diterima dari jasa yang haram, menjadi rizki yang haram, oleh karenanya jasa yang diberikan harus sesuai dan tidak keluar dari ketetapan agama.

d) *Ma’qud alaihi* (barang yang menjadi objek).

Sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dilarang memberikan jasa yang haram seperti keahlian membuat minuman keras atau membuat iklan miras dan sebagainya. Asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan

⁶⁹Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

Islam dan *aqad* atau transaksinya berjalan sesuai aturan Islam. Bila pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim juga tetap tidak diperbolehkan.⁷⁰

- e) *Gharar* atau *taghrir* adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Garar dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Menurut Imam an-Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat islam.⁷¹

Perbedaan taghrir dengan tadlis adalah apabila tadlis terjadi pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B (*unknown to one party*), sedangkan dalam taghrir baik pihak A dan pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. Gharar bisa terjadi apabila mengubah sesuatu yang bersifat *certain* atau pasti menjadi *uncertain* atau tidak pasti.⁷²

Gharar berasal dari bahasa Arab *Al-Khatr* yang bermakna pertaruhan.

Al-gharar adalah *al-mukhatarah* (pertaruhan) dan *al-jahalah*

⁷⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 47.

⁷¹ Dahlan, Abdul Aziz (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. hlm. 399. ISBN 979-8276-93-0

⁷²Karim, A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada ISBN 979-421-997-5

(ketidakjelasan) sehingga termasuk ke dalam perjudian. Sehingga dari penjelasan tersebut, yang dimaksud jual beli gharar adalah dalam perdagangan tersebut semua jual beli yang transaksinya mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.⁷³

Secara etimologi, garar dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang pada lahirnya disenangi tetapi sebenarnya dibenci. Para ahli fikih mengemukakan beberapa definisi garar yang bervariasi dan saling melengkapi. Menurut Imam al-Qarafi, gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara atau ikan yang masih di dalam air.

Gharar dapat terjadi dalam empat hal yaitu:

1. Kuantitas.
2. Kualitas.
3. Harga.
4. Waktu penyerahan.

Apabila salah satu atau lebih faktor-faktor di atas diubah dari pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*), maka terjadilah gharar. Meskipun pada awalnya terjadi kesepakatan secara sukarela, namun kondisi ketidakjelasan tersebut di kemudian hari akan membuat salah satu pihak (penjual atau pembeli) merasa terzalimi.

⁷³Sholahuddin, M. & Hakim, L. (2008). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press ISBN 978-979-636-086-4

Adapun syarat-syarat upah, menurut Taqiyyudin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

- 1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad. maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara langsung sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.
- 3) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- 4) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.

- 5) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- 6) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.⁷⁴

4) Macam-Macam Upah

Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang, tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang.

Taqiyyudin an-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi:

- a. Upah (*ajrun*) *musamma*, yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan.
- b. Upah (*ajrun*) *misl'* yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.⁷⁵

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

Hal-hal yang terkait dengan upah adalah:

- a) Upah bersih, merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.
 - b) Upah borongan, merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) melainkan atas dasar satuan barang (tugas) yang harus dikerjakan.
 - c) Upah harian, merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.⁷⁶
 - d) Upah lembur, merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan buruh yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
 - e) Upah minuman, merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
 - f) Upah wajar, merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan.⁷⁷
- 5) Sistem pengupahan dan berakhirnya akad⁷⁸
- a) Sistem pengupahan

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain,

⁷⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, Cet ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.229.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Rahmat, *Fiqh Muammalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 71.

jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

Jika *musta'jir*. Ia berhak menerima baayaranya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaanya.⁷⁹

Upah berhak diterima dengan syarat:

- 1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- 2) Mendapat manfaat, jika *Ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- 3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- 4) Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.⁸⁰

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat yang diIjarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁸¹

⁷⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah....*, h.236.

⁸⁰ Taqyudin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1960),h. 102.

Menurut mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.⁸²

Upah menurut Benham yang dikutip Afzalur Rahman dalam bukunya “Doktrin Ekonomi Islam”, upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa sesuai dengan perjanjian.⁸³

Proses penentuan upah yang islami berasal dari dua faktor: objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Misal, tata cara pembayaran upah. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, yang berbunyi:

⁸¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*., hal 287

⁸² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* h.103.

⁸³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995), h. 361.

(رواه ابن ما جه) قُهُعَرَيِّجَفَانَقَبْلَا عَطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya.’ (HR. Ibnu Majah).⁸⁴

Upah mengupah atau Ijarah ‘ala al-a’mal, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah ‘ala al-a’mal* terbagi dua yakni:

- 1) *Ijarah khusus*, yaitu yang dilakukan pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah mem beri upah. Contoh :heri mempekerjakan Agung, selama Agung bekerja ditepat Heri dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Agung tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan Agung tersebut belum selesai, dalam arti kata lain Ijarah khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
- 2) *Ijarah musytarik*, yaitu Ijarah yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama hukumnya dibolehkan krja sama dengan orang lain.⁸⁵

⁸⁴Taqyudin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1960),h. 103.

⁸⁵Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 361.

b) Berakhirnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditanganya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditanganya, ia mendapat upah.

Ulama hanifiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:

- a) Jika benda di tangan *ajir*, jika bekas pekerjaan *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
- b) Jika benda di tangan *ajir*, jika tidak ada bekas pekerjaan *ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- c) Jika benda berada ditangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.⁸⁶

C. Tinjauan Pustaka

Topik utama yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam skripsi ini, adalah masalah *hijarah* dan upah. Skripsi ini bukan skripsi pertama yang membahas mengenai masalah *hijarah* dan upah, tetapi berbeda tujuan, tempat penelitian, dan objek yang diteliti. Hal ini dapat dilihat dari beberapa skripsi *danijarah* dan, diantaranya yaitu:

1. Skripsi karya Asep Rakhmat Riyadi (2015) mahasiswa jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, dengan judul : Strategi Hidup Buruh Porter Di Stasiun Tawang Kota Semarang

⁸⁶Rahmat Syafe'i, *Fiqih Islam Lengkap*. h,133-134.

Skripsi ini membahas mengenai, bagaimana strategi hidup buruh porter di stasiun tawang semarang.⁸⁷

2. Skripsi karya Dzikri Darmawan (2018), mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul Skripsi : “Praktik Upah Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) (Studi kasus di Terminal Purabaya Surabaya)”. Skripsi ini membahas mengenai praktik sistem pembayaran upah kuli pengangkut barang (Porter) di Terminal Purabaya Surabaya yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.⁸⁸
3. Skripsi karya Retno Purnawati (2016), mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul skripsi : “Praktik Ijarah Kuli Pengangkut Barang (Porter), (Studi di Terminal Bulupitu Purwokerto)”. Skripsi ini membahas sistem Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik ijarah kuli pengangkut barang (Porter) yang terjadi di terminal Bulupitu Purwokerto.⁸⁹

Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya ialah, skripsi sebelumnya membahas tentang sistem praktik upah menyewa jasa porter antara penyewa jasa porter, sementara itu skripsi yang ditulis oleh penulis sekarang ini berhubungan dengan sistem praktik pembayaran upah

⁸⁷ Asep Rakhmat Riyadi, “*Strategi Hidup Buruh Porter Di Stasiun Tawang Kota Semarang*”. (Skripsi Program Strata Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2015).

⁸⁸ Dzikri Darmawan, “*Praktik Upah Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) (Studi kasus di Terminal Purabaya Surabaya)*”. (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

⁸⁹ Retno Purnawati, “*Praktik Ijarah Kuli Pengangkut Barang (Porter)*” (Studi di Terminal Bulupitu Purwokerto). (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

pengupah antara penyewa jasa porter dan buruh porter yang tidak menjelaskan tarif upahnya diawal pendakian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam, Cet ke-1* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 136.
- Abi Yahya Zakaria, *Fath Al Wahab*, Juz I (Semarang: Toha Putra, 2007), h. 246.
- Achmad Sunarto at-al, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7 (Semarang:As-syifa, 1983), h. 520.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 361.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Amzah, 2010), h. 338.
- Anni Maghfuroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah di KSPPS BMT Tayu Abadi Pati*”. (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Semarang, Semarang, 2017).
- Bapak Benyamin (Penjaga Basecamp), Wawancara, Desa Teba Pering Raya, 29 Agustus 2020
- Boby Aldo Saputra (Pendaki), Wawancara, Desa Teba Pering Raya, 29 Agustus 2020
- Dahlan, Abdul Aziz (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. hlm. 399. ISBN 979-8276-93-0
- D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet ke-4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 663.
- Department pendidikan Nasional, *Kamus Besarbahasa indonesia pusat bahasa*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama Cetke IX Edisi IV, 2015), h.58
- Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “*Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*” Jurnal AlAdalah.Vol.IINo.2, h. 227. (Online), tersedia di:<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> diakses (Online) Tanggal 8 Januari 2020).
- Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musaththalahul hadits* (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), h. 20.

Fatwa DSN-MUI No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 30.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (JakartaRaja Grafindo, 2014), h. 117.

Ibnu Rasyid, *Bidayah Al Mujtahid juz 2*, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, 2001), h. 165

Ilmahadi Aziz (Porter), Wawancara, Desa Teba Pering, 29 Agustus 2020

Karim, A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada ISBN 979-421-997-5

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 134.

M. Hasbi Ash Shidiqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), h.17.

Mu' Ammal Hamidy, Imron A. Manan, *Syarah Riyadhush Shalihin* (Surabaya: Bhina Ilmu, 2003), h. 362.

Muhammad, "Penjaminan tenaga kerja secara manusiawi" (On-line), tersedia di: <https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html>(12November2019

Muhammad Noerosidi (Pendaki), Wawancara, Desa Teba Pering Raya, 29 Agustus 2020

Muhammad Willy Ragasti (Pendaki), Wawancara, Desa Teba Pering Raya, 29 Agustus 2020

Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.117.

Muhammad Nashiruddin Al Albani yang diterjemahkan oleh Ahmad Yoswaji, *Shahih Sunan An-Nasa'i*(Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h.58.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah(Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Quran)*, Cet ke 2(Jakarta: Lentera Hati, 2009), h.601.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet ke-9 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah*(Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), h. 180.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*,Cet ke-1(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.229.
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2011), h. 121-124.
- Rafiuddin, "*Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Hukum Islam*". (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah UniversitasIslam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017).
- Reza Hafidz (Porter), Wawancara, Desa Teba Pering , 29 Agustus 2020
- Sholahuddin, M. & Hakim, L. (2008). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press ISBN 978-979-636-086-4
- Syamsul Hilal, *Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat, Asas*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 3.
- Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 145.
- Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternative Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 83.
- TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 428.
- Asep Rakhmat Riyadi, "*Strategi Hidup Buruh Porter Di Stasiun Tawang Kota Semarang*". (Skripsi Program Strata Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2015).

Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 387

Dzikri Darmawan, “ *Praktik Upah Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) (Studi kasus di Terminal Purabaya Surabaya*”. (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Retno Purnawati, “*Praktik Ijarah Kuli Pengangkut Barang (Porter)*” (Studi di Terminal Bulupitu Purwekerto”. (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwekerto, 2016).

